



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 4 TAHUN 2017

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

PEMERINTAHAN DESA

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2017**

**Salinan**

**NO : 4 /LD/2017**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 4 TAHUN 2017**

---

**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan regulasi pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi, maka Peraturan

Daerah Kabupaten  
Indramayu Nomor 13 Tahun  
2015 tentang Pemerintahan  
Desa, perlu disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pemerintahan Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMERINTAHAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD.

9. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
10. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kuwu dan pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Kuwu adalah sebutan lain bagi kepala desa di Kabupaten Indramayu.
14. Pamong Desa adalah sebutan lain dari perangkat desa di Kabupaten Indramayu, dan merupakan unsur pembantu kuwu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.



15. Penjabat Kuwu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban kuwu dalam kurun waktu tertentu.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
22. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

25. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
26. Tanah Bengkok adalah tanah asli milik desa berdasarkan asal usul, diperuntukkan sebagai tambahan tunjangan penghasilan kuwu, pamong desa dan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.
27. Tanah Titisara adalah tanah asli milik desa yang berdasarkan asal usul, yang semula diperuntukkan sebagai dana untuk pembangunan desa.
28. Tanah Eks Pengangonan adalah tanah negara yang berdasarkan asal usulnya sebagai tempat penggembalaan ternak di saat pemerintahan Hindia Belanda, pasca kemerdekaan dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah desa dan sebagai sumber pendapatan asli desa.
29. Pasar Desa adalah bagian dari kekayaan desa, baik tanah dan bangunannya asli dibangun dan diadakan oleh pemerintah desa, serta merupakan pendapatan asli desa.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

31. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PENATAAN DESA

### Bagian Kesatu Pembentukan Desa

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.
- (3) Pembentukan desa diprakarsai oleh :
  - a. pemerintah; atau
  - b. pemerintah daerah.

Paragraf 1  
Pembentukan Desa oleh Pemerintah

Pasal 3

- (1) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional di daerah.
- (2) Prakarsa pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan desa harus memenuhi syarat :
  - a. batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun dihitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 6000 (enam ribu) jiwa atau 1200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah diatur dengan Peraturan Bupati;

- g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik;
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.
- (4) Cakupan wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

#### Paragraf 2

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Pasal 5

Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah dapat berupa :

- a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 6

Pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran desa.

- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) membentuk tim pembentukan desa persiapan.
- (2) Tim pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
  - b. Camat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil tim pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan.



- (5) Dalam hal rekomendasi desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

Pasal 9

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 10

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register desa persiapan.
- (3) Kode register desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode desa induknya.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat kuwu persiapan.
- (5) Pejabat kuwu desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

- (6) Pejabat kuwu desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada Bupati melalui kuwu induknya.
- (7) Pejabat kuwu desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi :
  - a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan pamong desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar-desa.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat kuwu desa persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa.

Pasal 11

- (1) Penjabat kuwu desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) kepada :
  - a. kuwu induk; dan
  - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan desa persiapan tersebut layak menjadi desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa.
- (6) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (7) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode desa dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah desa.

#### Pasal 13

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan desa persiapan tersebut tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 14

Ketentuan mengenai pembentukan desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 15

- (1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme :
  - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah desa;
  - b. hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan desa;
  - c. hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam Keputusan Bersama BPD;

- d. Keputusan Bersama BPD ditandatangani oleh para kuwu yang bersangkutan; dan
  - e. para kuwu secara bersama-sama mengusulkan penggabungan desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua  
Penghapusan Desa

Pasal 16

- (1) Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang pemerintah.

Bagian Ketiga  
Perubahan Status Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

Perubahan status Desa meliputi :

- a. desa menjadi kelurahan; dan
- b. kelurahan menjadi desa.

Paragraf 2

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 18

Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 19

- (1) Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kuwu kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.



- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kuwu, pamong desa, dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kuwu, pamong desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 21

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
KEWENANGAN DESA

Pasal 23

Kewenangan desa meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah; dan

- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a paling sedikit terdiri atas :
  - a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - b. pengelolaan tanah kas desa dan tanah eks pengangonan; dan
  - c. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan :
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa;
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian; dan
- l. pengelolaan dan pemanfaatan tanah eks pengangonan bagi desa-desa yang ada tanah eks pengangonannya.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b dengan melibatkan desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PEMERINTAH DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Unsur Pemerintah Desa**

Pasal 27

Pemerintah desa terdiri dari kuwu dan pamong desa.

**Paragraf 1**  
**Pemilihan Kuwu**

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kuwu diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 2  
Pemilihan Kuwu Antar waktu  
Melalui Musyawarah Desa

Pasal 29

- (1) Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kuwu antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kuwu diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
    1. pembentukan panitia pemilihan kuwu antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kuwu diberhentikan;
    2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kuwu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
    3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kuwu paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kuwu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  6. penetapan calon kuwu antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  2. pengesahan calon kuwu yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

3. pelaksanaan pemilihan calon kuwu oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon kuwu oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
5. pengesahan calon kuwu terpilih oleh musyawarah desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kuwu melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kuwu terpilih;
7. pelaporan calon kuwu terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan



9. pelantikan kuwu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kuwu antar waktu, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Tugas dan Wewenang Kuwu

Pasal 30

- (1) Kuwu mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuwu mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan pamong desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Hak dan Kewajiban Kuwu

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), kuwu berhak:
  - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada pamong desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), kuwu berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;

- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

### Pasal 32

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) kuwu mempunyai kewajiban untuk :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

### Pasal 33

Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, kuwu berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban aset desa berupa tanah titisara, tanah bengkok dan tanah eks penganganan, dan/atau lainnya pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

### Pasal 34

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;

- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan;  
dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 35

- (1) Kuwu wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai;  
dan

d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kuwu kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

#### Pasal 36

- (1) Kuwu menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kuwu.



Pasal 37

- (1) Kuwu yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 dan Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 5

Larangan Kuwu

Pasal 38

Kuwu dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan tugas, wewenang, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;

- f. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI;
- k. terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Presiden dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 39

- (1) Kuwu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 6  
Masa Jabatan Kuwu

Pasal 40

- (1) Kuwu memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kuwu yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal kuwu mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kuwu dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

- (5) Bagi calon kuwu yang telah menjabat selama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan penyesuaian masa jabatan dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun, atau 8 (delapan) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun, dihitung satu kali masa jabatan.

Paragraf 7  
Pemberhentian Kuwu

Pasal 41

- (1) Kuwu berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kuwu;
  - d. melanggar larangan sebagai kuwu;

- e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kuwu; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kuwu berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 42

Dalam hal sisa masa jabatan kuwu yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kuwu sampai terpilihnya kuwu yang baru.

Pasal 43

Dalam hal sisa masa jabatan kuwu yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai pejabat kuwu sampai terpilihnya kuwu yang baru melalui hasil musyawarah desa.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kuwu, kuwu yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat pejabat kuwu.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati mengangkat pejabat kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah.

## 46

### Pasal 45

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kuwu.

### Pasal 46

- (1) Kuwu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai kuwu dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kuwu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 47

Kuwu dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kuwu;

## 47

- b. melanggar larangan sebagai kuwu;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

## Pasal 48

Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 49

- (1) Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kuwu, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kuwu yang bersangkutan sebagai kuwu sampai dengan akhir masa jabatannya.



- (2) Apabila kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kuwu yang bersangkutan.

Pasal 50

Dalam hal kuwu diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, juru tulis melaksanakan tugas dan kewajiban kuwu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kuwu dan/atau pejabat kuwu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pamong Desa

Paragraf 1  
Pangkatan Pamong Desa

Pasal 52

Pamong Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat; dan
- g. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.

Pasal 53

- (1) Pengangkatan Pamong Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
  - a. kuwu dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  - b. kuwu melakukan penjaringan dan penyaringan calon pamong desa yang dilakukan oleh tim;

- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon pamong desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan pamong desa kosong atau diberhentikan;
  - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon pamong desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kuwu kepada Camat;
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon pamong desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, kuwu menerbitkan Keputusan Kuwu tentang Pengangkatan Pamong Desa; dan
  - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, kuwu melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon pamong desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Kuwu.

Pasal 54

- (1) Pegawai Negeri Sipil setempat yang akan diangkat menjadi pamong desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi pamong desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi pamong desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pamong desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Unsur Pamong Desa

Pasal 56

- (1) Pamong Desa terdiri atas :
  - a. sekretariat desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (2) Pamong Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kuwu.

Pasal 57

- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh juru tulis dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kuwu dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kuwu sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 59

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kuwu sebagai pelaksana tugas operasional.

- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Hak dan Kewajiban Pamong Desa

Pasal 60

- (1) Pamong desa bertugas membantu kuwu dalam melaksanakan tugas dan wewenang kuwu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pamong desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kuwu.

Pasal 61

- (1) Pamong desa berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Pamong desa berhak memperoleh jaminan kesehatan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, hak dan kewajiban pamong desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Larangan Pamong Desa

Pasal 63

Pamong desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 64

- (1) Pamong desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.



Paragraf 5  
Pemberhentian Pamong Desa

Pasal 65

- (1) Pamong desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pamong desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pamong desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai pamong desa.

Pasal 66

Pemberhentian Pamong Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian pamong desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian pamong desa yang telah dikonsultasikan dengan kuwu; dan

- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian pamong desa dengan Keputusan Kuwu.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian pamong desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 68

- (1) Kuwu dan pamong desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 69

- (1) Penghasilan tetap kuwu dan pamong desa dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.

- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kuwu dan pamong desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
  - a. kuwu;
  - b. juru tulis paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kuwu perbulan; dan
  - c. pamong desa selain juru tulis paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap kuwu perbulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap kuwu dan pamong desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 70

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, kuwu dan pamong desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Badan Permusyawaratan Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 71

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Paragraf 2  
Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 72

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuwu membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kuwu.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pamong desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

### Pasal 73

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kuwu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kuwu kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 74

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

#### Pasal 75

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.



- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari kuwu atau musyawarah perwakilan tentang hasil pemilihan langsung.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.

#### Pasal 76

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

### Paragraf 3

#### Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu

#### Pasal 77

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan BPD melalui kuwu.
- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (4) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak tersedia, pengisian anggota BPD Antar Waktu berpedoman kepada prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 73.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

Paragraf 4  
Fungsi dan Wewenang BPD

Pasal 78

- (1) BPD mempunyai fungsi :
- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kuwu;
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
  - c. melakukan pengawasan kinerja kuwu.
- (2) BPD mempunyai wewenang :
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu;
  - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kuwu;
  - c. membentuk panitia pemilihan kuwu; dan
  - d. menyusun peraturan tata tertib BPD.

Paragraf 5  
Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 79

- (1) BPD berhak :
  - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
  - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.
  - d. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - e. mengajukan pertanyaan;
  - f. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - g. memilih dan dipilih; dan
  - h. mendapat tunjangan dari APBDesa.
- (2) Anggota BPD wajib :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Paragraf 6  
Larangan Anggota BPD

Pasal 80

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;

- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai kuwu dan pamong desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf 7  
Masa Jabatan BPD

Pasal 81

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 8  
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 82

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
  - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (3) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 83

- (1). Pemberhentian Pimpinan BPD, keanggotaan BPD dan BPD Pengganti Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2). Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Camat terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 9

Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 84

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
  - a. waktu musyawarah BPD;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - c. tata cara musyawarah BPD;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan



- d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kuwu;
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat kuwu atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kuwu; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

Bagian Keenam  
Musyawarah Desa

Pasal 85

- (1) Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa serta dibiayai dari APBDesa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat serta dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 86

- (1) Musyawarah desa bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penataan desa;
  - b. perencanaan desa;
  - c. kerjasama desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa;
  - g. kejadian luar biasa; dan
  - h. pemilihan kuwu antar waktu.
- (3) Pengambilan keputusan dalam musyawarah desa dilaksanakan dengan sistem musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.

Pasal 87

Ketentuan mengenai tahapan, tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan musyawarah desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu  
Peraturan Desa

Pasal 88

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh pemerintah desa.
- (2) BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disosialisasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

## Pasal 89

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kuwu untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kuwu dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh juru tulis.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh pemerintah desa.

Bagian Kedua  
Pembiayaan

Pasal 90

Pembiayaan pembentukan Peraturan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Bagian Ketiga  
Peraturan Kuwu

Pasal 91

Peraturan Kuwu merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.

Pasal 92

- (1) Peraturan Kuwu ditandatangani oleh kuwu.
- (2) Peraturan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh juru tulis dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.
- (3) Peraturan Kuwu wajib disebarluaskan oleh pemerintah desa.

Bagian Keempat  
Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu

Pasal 93

Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Kelima  
Peraturan Bersama Kuwu

Pasal 94

- (1) Peraturan bersama kuwu merupakan peraturan kuwu dalam rangka kerjasama antar-desa.
- (2) Peraturan bersama kuwu ditandatangani oleh kuwu dari 2 (dua) desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar-desa.
- (3) Peraturan bersama kuwu disebarluaskan kepada masyarakat desa masing-masing.

Pasal 95

Tata cara pembentukan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati.



BAB VI  
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu  
Keuangan Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 96

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.

Pasal 97

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 98

Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kuwu dan bendahara desa.

Pasal 99

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penatausahaan;
  - d. pelaporan; dan
  - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kuwu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu menguasai sebagian kekuasaannya kepada pamong desa.

Pasal 100

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Paragraf 2

Pengalokasian Bersumber dari APBN dan APBD

Pasal 101

- (1) Pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN ditetapkan melalui APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kuwu dan pamong desa; dan

- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Pengalokasian dan tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (3) Pengalokasian dan tata cara pembagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 104

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 3  
Penyaluran

Pasal 105

- (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah daerah ke desa dilakukan secara bertahap.

- (2) Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi atau APBD ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Belanja Desa

Pasal 106

- (1) Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
1. penghasilan tetap dan tunjangan kuwu dan pamong desa;
  2. operasional pemerintah desa;
  3. tunjangan dan operasional BPD; dan
  4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kuwu dan pamong desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
APB Desa

Pasal 107

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kuwu dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kuwu kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Ketentuan pengelolaan keuangan desa akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 108

- (1) Bupati menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.



- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kuwu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Paragraf 6  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 109

- (1) Kuwu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 110

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), kuwu juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 111

Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 113

- (1) Kekayaan milik desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas pemerintah desa.
- (3) Kekayaan milik desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman serta dilarang dimiliki secara pribadi oleh kuwu atau pamong desa baik pada saat masih menjabat maupun sudah tidak menjabat sebagai kuwu atau pamong desa.
- (4) Pengalihan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperkenankan dalam bentuk pelelangan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan aset desa dan untuk masa waktu yang tidak melebihi 1 (satu) tahun serta resmi dilakukan oleh dan atas nama desa serta dana yang ada tercatat sebagai pendapatan desa.

- (5) Kekayaan milik desa berupa tanah secara bertahap harus disertifikatkan dengan beban biaya APB Desa.

#### Pasal 114

Kekayaan milik desa dapat berupa tanah titisara, tanah bengkok dan tanah eks pengangonan, pasar desa, pasar hewan, tambangan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa serta kekayaan milik desa yang dipisahkan berupa aset milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

#### Pasal 115

Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

#### Paragraf 2

Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

#### Pasal 116

- (1) Kuwu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa.

- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuwu dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada pamong desa.

Pasal 117

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa. Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 120

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Khusus terkait dengan pendirian dan pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBANGUNAN DESA DAN  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
Bagian Kesatu  
Pembangunan Desa

Paragraf 1  
Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 121

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

- (2) Musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 122

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 123

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kuwu terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 124

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kuwu, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan daerah.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kuwu.

Pasal 125

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian :
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar-desa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan
  - e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur pamong desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah daerah.

- (5) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal tertentu, pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

- (6) Dalam hal pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 127

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal :
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 129

- (1) Kuwu mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pamong desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kuwu dalam forum musyawarah desa.
- (5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 130

- (1) Program sektoral dan program daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

Bagian Kedua  
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 131

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas :
  - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
  - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-desa secara terpadu;
  - c. penguatan kapasitas masyarakat;
  - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
  - e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh desa di kawasan perdesaan.

#### Pasal 132

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. pemerintah desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kuwu kepada Bupati;
  - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
  - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
  - (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
  - (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten.

- (6) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.
- (7) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa ditugaskan pelaksanaannya kepada desa.

Pasal 133

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan pemerintah desa.
- (3) Pelibatan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal :
  - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset desa dan tata ruang desa; dan



- c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pendampingan Masyarakat Desa

Paragraf 1  
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 134

- (1) Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak ketiga.

- (3) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa, BPD, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUM Desa, badan kerjasama antar-desa, forum kerjasama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 135

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, dengan cara :

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- i. melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan;
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Paragraf 2  
Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 136

- (1) Pendampingan masyarakat desa dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah dan pemerintah daerah, secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.

- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya.

Pasal 137

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) terdiri atas :
- a. tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
  - b. tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
  - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
  - d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintah, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

#### Pasal 138

- (1) Pengadaan sumber daya manusia pendamping untuk desa dilakukan melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat desa melalui mekanisme musyawarah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.

BAB VIII  
KERJA SAMA DESA

Pasal 139

- (1) Kerjasama desa dilakukan antar-desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama antar-desa diatur dengan Peraturan Bersama Kuwu.
- (3) Pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. ruang lingkup kerjasama;
  - b. bidang kerjasama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar-desa ataupun kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 140

- (1) Badan kerjasama antar-desa terdiri atas :
  - a. pemerintah desa;
  - b. anggota BPD;
  - c. lembaga kemasyarakatan desa;
  - d. lembaga desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kuwu.
- (3) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada kuwu.

Pasal 141

Perubahan atau berakhirnya kerjasama desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerjasama desa.

Pasal 142

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dapat dilakukan oleh para pihak.

- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerjasama desa atas ketentuan kerjasama desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 143

Kerjasama desa berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.



Pasal 144

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN  
LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu  
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 146

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi :
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
  - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 147

Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya di desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

#### Bagian Kedua Lembaga Adat Desa

#### Pasal 148

Pembentukan lembaga adat desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 149

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH  
CAMAT

Pasal 150

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu;
  - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
  - c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kuwu dan pamong desa;
  - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kuwu;
  - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;

- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian pamong desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerjasama antar-desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

**BAB XI  
SANKSI PIDANA**

**Pasal 151**

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 113 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 152**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 153

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 11 Agustus 2017

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 11 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2017 NOMOR : 4

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 4/127/2017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH  
NIP. 196502061993011001